

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 3 September 2024
Waktu : 13.20 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023;
2. RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
4. Isu-isu aktual lainnya.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 27 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal);
3. Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak, CSFA (Inspektur Jenderal);
4. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut);
5. Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
6. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya);

7. Dr. Budi Sulistiyo, M.Si. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);
9. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
10. Ir. Ishartini (Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan);
11. Dr. Sahat M. Panggabean, (Kepala Badan Karantina Indonesia);
12. Ir. Bambang, M.M. (Plt. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia);
13. Sis Apik Wijayanto (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD);
14. Sigit Muhartono (Direktur Utama PT Perikanan Indonesia); dan
15. Arif Haendra (Direktur Utama PT Garam (Persero)).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dihadiri oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, dan Direktur Utama PT Garam (Persero), membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023, RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu aktual lainnya, dibuka pukul 13.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 per-31 Desember 2023 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebesar Rp1.699.152.504.614,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus empat belas rupiah) atau

mencapai 41,56% dari Estimasi/Target Pendapatan sebesar Rp4.088.397.466.000,00 (empat triliun delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- b. Realisasi Belanja Negara bersih, sebesar Rp6.335.595.925.317,00 (enam triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau mencapai 98,15% dari alokasi anggaran, sebesar Rp6.455.280.145.000,00 (enam triliun empat ratus lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA Tahun 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, sebesar Rp6.220.563.824.000,00 (enam triliun dua ratus dua puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, sebesar Rp6.164.105.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh empat miliar seratus lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menambah kegiatan bantuan pemerintah di daerah masing-masing apabila usulan tersebut direalisasikan.
 4. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai usulan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik Tahun 2025, sebesar Rp1.309.900.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Provinsi, sebesar Rp785.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. Kabupaten/Kota, sebesar Rp524.900.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
 5. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan program dan kegiatan yang bersumber dari PHLN sebesar Rp1,3 triliun (22,29%) dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6.220.563.824.000,00 (enam triliun dua ratus dua puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memetakan potensi *Carbon Trade* di seluruh wilayah Indonesia yang berasal dari pesisir dan laut, seperti mangrove, padang lamun, rumput laut, plankton, dan lain-lain.
7. Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman atas usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151